

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan perhitungan yang dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan :

1. Hasil analisis data menunjukkan bahwa selama periode 2010-2022, terdapat hubungan positif dan signifikan antara Pajak Daerah dengan Belanja Modal di Kabupaten Bojonegoro. Nilai signifikansi untuk Pajak Daerah adalah 0,001 yang artinya lebih rendah dari tingkat signifikansi yang ditetapkan yaitu sebesar 0,05, yang menunjukkan bahwa variabel Pajak Daerah memiliki signifikansi yang kuat dengan Belanja Modal di Kabupaten Bojonegoro. Artinya semakin tinggi Pajak Daerah maka akan semakin tinggi juga Belanja Modal, sebaliknya semakin rendah Pajak Daerah maka semakin rendah juga Belanja Modal. Sebagai akibatnya, hipotesis (H1) diterima.
2. Hasil analisis data menunjukkan bahwa selama periode 2010-2022, terdapat hubungan negatif dan signifikan antara Retribusi Daerah dengan Belanja Modal di Kabupaten Bojonegoro. Nilai signifikansi untuk Retribusi Daerah adalah 0,045 yang artinya lebih rendah dari tingkat signifikansi yang ditetapkan yaitu sebesar 0,05, yang menunjukkan bahwa variabel Retribusi Daerah memiliki pengaruh negative dan signifikan dengan Belanja Modal di Kabupaten Bojonegoro. Artinya semakin tinggi

Retribusi Daerah maka Belanja Modal akan menurun. Sebagai akibatnya, hipotesis (H2) diterima.

3. Hasil analisis data menunjukkan bahwa selama periode 2010-2022, tidak terdapat hubungan signifikan antara Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Belanja Modal di Kabupaten Bojonegoro. Nilai signifikansi untuk Dana Alokasi Umum (DAU) adalah 0,289 yang artinya lebih tinggi dari tingkat signifikansi yang ditetapkan yaitu sebesar 0,05, yang menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum (DAU) tidak memiliki hubungan signifikansi dengan Belanja Modal di Kabupaten Bojonegoro. Sebagai akibatnya, hipotesis (H3) ditolak.
4. Hasil analisis data menunjukkan bahwa selama periode 2010-2022, tidak terdapat hubungan signifikan antara Inflasi dengan Belanja Modal di Kabupaten Bojonegoro. Nilai signifikansi untuk Inflasi adalah -1,746 yang artinya lebih tinggi dari tingkat signifikansi yang ditetapkan yaitu sebesar 0,05, yang menunjukkan bahwa variabel Inflasi tidak memiliki hubungan signifikansi dengan Belanja Modal di Kabupaten Bojonegoro. Sebagai akibatnya, hipotesis (H4) ditolak.

5.2 Saran

1. Upaya pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk meningkatkan pendapatan daerahnya terutama melalui sektor pajak daerah dan retribusi daerah bertujuan agar alokasi anggaran untuk belanja modal juga dapat ditingkatkan, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat.

2. Pentingnya semangat kemandirian fiskal harus semakin dipertegas dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bojonegoro.
3. Pengeluaran pemerintah daerah dalam bentuk belanja modal harus lebih diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ini menegaskan bahwa pengeluaran pemerintah daerah, khususnya untuk belanja modal, harus lebih fokus pada sektor-sektor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemandirian masyarakat secara berkelanjutan.
4. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat menjadi landasan untuk penelitian lanjutan. Disarankan agar penelitian berikutnya menggunakan periode waktu yang lebih luas dan memasukkan variabel independen tambahan untuk mendapatkan hasil yang lebih relevan.